

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI NTT

Yuan Valentino Elim¹ Abu Hasan Sangaji² Noverius Nggili³

¹Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

²Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

³Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

Presenting Author: yuanvalentino@gmail.com

*Corresponding Author: yuanvalentino@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan dampak pandemi covid-19 terhadap makro ekonomi Provinsi NTT dan Dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di Provinsi NTT. Metode yang digunakan yakni pendekatan gabungan/mix method dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survei online dan desk study. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dan merupakan kombinasi antara purposive sampling, convenience sampling, dan voluntary sampling dengan kurun waktu pelaksanaan survei selama 1 bulan dan jumlah responden yang mengisi survei ini berjumlah 519 responden.

Secara makro ekonomi, pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak pada Perlambatan ekonomi di Provinsi NTT. Perekonomian NTT triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar -1,96% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Selain itu pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada peningkatan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan peningkatan angka kemiskinan di NTT. Dan secara mikro ekonomi yaitu pada level rumah tangga di Nusa Tenggara Timur dengan adanya pandemi covid-19 ini mengakibatkan banyak rumah tangga mengalami penurunan pendapatan yang berujung pada penurunan daya beli. Dengan diberlakukannya berbagai pembatasan aktivitas diluar rumah juga menyebabkan meningkatnya pengeluaran dalam rumah tangga terutama untuk pembelian bahan makanan, pulsa/paket data, dan biaya listrik. Untuk mengimbangi pendapatan yang menurun dan meningkatnya pengeluaran maka ada responden yang berusaha untuk mencari alternatif sumber penghasilan lain dengan melakukan aktivitas berjualan online, menjual bahan makanan, menjual makanan dan minuman jadi, menjual obat-obatan dan vitamin serta masker.

Kata Kunci: pandemi, covid-19, perekonomian.

Abstract

This article describes the impact of the covid-19 pandemic on the macroeconomics of NTT Province and the impact of the covid-19 pandemic on household economic conditions in NTT Province. The method used is a combined approach / mix method with the data collection method used is through online surveys and desk studies. The sampling technique used is non probability sampling and is a combination of purposive sampling, convenience sampling, and voluntary sampling with a survey period of 1 month and the number of respondents who filled out this survey amounted to 519 respondents.

Macroeconomically, the covid-19 pandemic has had an impact on the economic slowdown in NTT Province. NTT's economy in the second quarter of 2020 contracted by -1.96% compared to the same period in 2019. In addition, the covid-19 pandemic also had an impact on increasing the number of open unemployment rates (TPT) and increasing poverty rates in NTT. And microeconomics is at the household level in East Nusa Tenggara with the covid-19 pandemic resulting in many households experiencing a decrease in income that leads to a decrease in purchasing power. With the enactment of various restrictions on activities outside the home also causes increased spending in households, especially for the purchase of groceries, credit / data packages, and electricity costs. To compensate for declining income and increased spending, there are respondents who are trying to find alternative sources of income by doing online selling activities.

Keywords: pandemic, covid-19, economy.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat dunia saat ini dan Indonesia menjadi salah satu negara yang juga turut merasakan dampak tersebut. Penyebaran covid-19 yang sangat cepat dan berbahaya telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial maupun ekonomi (McKibbin & Fernando, 2020). Pandemi COVID-19 telah menyebar dengan cepat hampir ke seluruh dunia dan telah menginfeksi jutaan orang sehingga membuat aktivitas ekonomi untuk sementara dihentikan karena banyak negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas yang ketat guna menghentikan penyebaran virus ini. Guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini merupakan guncangan ekonomi terbesar yang dialami dunia dalam beberapa dekade terakhir ini (Worldbank, 2020). Aktivitas ekonomi global diperkirakan melambat akibat diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas dan juga adanya kebijakan *lockdown* di berbagai negara. IMF juga memprediksikan bahwa ekonomi global diperkirakan akan melambat atau turun pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 (Aliah, 2020). Sama halnya dengan Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan menurun pada angka 2,1% dikarenakan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan masif di Indonesia (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020).

Pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini telah berdampak pada beberapa sektor seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan juga sektor-sektor lainnya (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Di Indonesia, pandemi covid-19 berdampak signifikan pada menurunnya kinerja ekspor, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan, serta menurunnya kinerja pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor utama yang paling terdampak akibat pandemi ini adalah sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, ritel, dan manufaktur (Media Indonesia, 2020). Menurunnya kinerja perekonomian Indonesia akibat pandemi covid-19 semakin membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin tertekan terutama pada level rumah tangga.

Salah satu provinsi di Indonesia yang juga merasakan dampak dari penyebaran virus corona (Covid-19) adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data sebaran kasus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kasus positif covid-19 ditemukan di 34 provinsi termasuk Provinsi NTT. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi NTT jumlah kasus positif covid-19 di Provinsi NTT per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 118 kasus positif, sembuh 87 orang dan yang meninggal 1 orang. Dimana 118 kasus tersebut tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Manggarai Barat, Ende, Flores Timur, Nagekeo, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan TTS. Data terakhir pada bulan Desember tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah kasus positif covid-19 di NTT telah mencapai 2041 jiwa, sembuh 1120, meninggal 43 jiwa dan yang masih dirawat sebanyak 878 jiwa (Pusdalops Provinsi NTT, 2020). Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 6 bulan terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan di Provinsi NTT dimana dalam kurun waktu 6 bulan tersebut terjadi penambahan 1923 kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Provinsi NTT dan telah tersebar di 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT.

Penyebaran virus corona yang masif ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benediktus Polomaing mengungkapkan bahwa saat ini di wilayah NTT terdapat sekitar 8 ribuan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari wabah virus

corona ini. Para pekerja yang terkena PHK tersebut adalah para pekerja yang bekerja di hotel, rumah makan, dan mall (bisnis.tempo.co tanggal 20 April 2020).

Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemprov NTT antara lain seperti kebijakan untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) bagi para aparatur sipil negaranya (ASN), larangan untuk bepergian atau bertugas ke luar daerah bagi para ASN, serta meliburkan sekolah-sekolah dan pembelajaran dilakukan secara online. Selain itu juga Pemprov NTT juga terus gencar untuk melakukan sosialisasi dan himbauan-himbauan untuk penerapan protokol kesehatan melalui berbagai media seperti tetap menjaga jarak, menghindari keramaian, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Pemerintah Provinsi NTT juga telah membuat kebijakan untuk menutup sementara tempat-tempat wisata yang ada di wilayah NTT serta menutup sementara pos-pos perbatasan antar negara RI – Timor Leste di Wini, Motaain, dan Motamasin. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menyiapkan dana sebesar 286 Milyar untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi warga terdampak pandemi covid-19 melalui skema bantuan sosial.

Dalam kajian ini akan menganalisis 2 (dua) hal yaitu dampak pandemi covid-19 terhadap makro ekonomi di Provinsi NTT dan dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di Provinsi NTT. Kajian ini penting dilakukan karena diharapkan dari hasil kajian ini dapat memberikan gambaran data dan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian yang terjadi Provinsi NTT. Sehingga data dan informasi tersebut dapat menjadi pedoman dan referensi dalam perumusan kebijakan serta penyusunan langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan wabah virus corona ini maupun upaya-upaya untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat pandemi covid-19 ini di Provinsi NTT.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Makro

Menurut Nanga (2001) Makro ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan (aggregate) termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian. Makro ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang mekanisme perekonomian secara menyeluruh (Soediyono, 2000). Menurut Mankiw (2006) Makroekonomi merupakan studi tentang perekonomian secara menyeluruh dan juga merupakan studi yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pertumbuhan pendapatan, kemiskinan, inflasi, kestabilan harga, resesi, depresi, pengangguran dan lainnya. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel secara keseluruhan (agregatif). Variabel-variabel yang dipelajari dalam ekonomi makro antara lain adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional (pemerintah maupun swasta), tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga, neraca pembayaran (ekspor dan impor) dan lainnya (Putong, 2013:8).

Menurut Putong (2013) Dalam ekonomi makro permasalahan yang muncul di bedakan atas 2 (dua) yaitu (1) Permasalahan jangka pendek merupakan permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memacu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya agar dapat terhindar dari berbagai permasalahan lainnya seperti inflasi yang meningkat, tingkat pengangguran terbuka yang besar, dan ketimpangan neraca pembayaran. (2) Permasalahan

jangka panjang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana memacu perekonomian agar tetap stabil antara pertumbuhan jumlah penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan investasi.

Menurut Putong (2013) Pembangunan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mengatasi dan meminimalisir masalah-masalah yang timbul dalam perekonomian untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan swasta dimana pemerintah bertindak sebagai pembuat regulasi (*regulator*) dan swasta bertindak sebagai pelaksananya. Sehingga dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah (1) Tingkat Kesempatan Kerja yang Tinggi, (2) Kapasitas Produksi Nasional yang Tinggi, (3) Tingkat Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, (4) Keadaan Perekonomian yang Stabil, (5) Neraca Pembayaran Luar Negeri yang Seimbang, dan (6) Distribusi Pendapatan yang Merata.

METODE PENELITIAN

Jenis/tipe pengkajian ini adalah pengkajian deskriptif dengan pendekatan *mix method* (gabungan antara kualitatif dan kuantitatif). Menurut Sudjana (2001) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam pengkajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian baik secara makro maupun mikro yaitu pada level rumah tangga yang terjadi di Provinsi NTT.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah etnografi virtual melalui survei secara daring/online dan *desk study* (referensi sekunder berupa data-data, jurnal, berita, dan laporan). Dengan menerapkan metode etnografi virtual melalui survei secara daring/online, diharapkan bahwa konstruksi subyek penelitian dan pemahaman objek tentang dampak ekonomi pandemi Covid-19 dapat diperoleh melalui jejak digital. Etnografi virtual memandang teknologi sebagai kelompok simbol dengan maknanya sendiri, sebagai bentuk metafora yang melibatkan konsep baru terhadap teknologi dan hubungannya dengan kehidupan sosial (Hine, 2000; Murthy, 2008). Dalam konteks inilah, informasi yang dikumpulkan berupa data-data dan informasi tentang dampak ekonomi pandemi covid-19 diperoleh melalui jejak digital atau diperoleh lewat survei online. Dalam pengkajian ini instrumen survei dibuat dalam bentuk *google form* yang kemudian *link* survei tersebut disebar dengan jangka waktu penyebaran selama 1 bulan yaitu dimulai pada tanggal 14 Juli sampai 14 Agustus 2020 ke 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT dengan menggunakan bantuan aplikasi media sosial *Whatsapp*.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yang merupakan kombinasi antara *purposive sampling*, *convenience sampling*, *voluntary sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dipilih karena kriteria sampel yang dapat mengisi survei ini adalah masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sementara bekerja atau sedang tidak bekerja dan memiliki penghasilan. Untuk *voluntary sampling* dipilih karena pengumpulan data melalui survei online bersifat partisipasi sukarela karena bersifat partisipasi dan sukarela maka jumlah sampel tidak ditentukan dalam penelitian tetapi dibatasi lama waktu pelaksanaan survei hanya 1 bulan sehingga diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memenuhi kriteria untuk menjadi responden untuk merespon dan mengisi survei ini dengan lama kurun waktu pelaksanaan survei selama 1 bulan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 2 yaitu data primer yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen survei/kuesioner oleh responden melalui survei online dan data

sekunder yang berasal dari catatan, dokumen, jurnal, buku dan arsip yang didapat dari hasil studi literatur atau studi dokumen yang berkaitan dengan topik pengkajian ini.

Teknik analisis data dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini analisis deskriptif dilakukan terhadap profil responden dan variabel-variabel untuk mengukur dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian di NTT yang di sajikan dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Provinsi NTT akan di analisis dalam 2 (dua) bagian yaitu (1) Dampak pandemi covid-19 terhadap makro ekonomi Provinsi NTT dan (2) Dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di NTT.

1) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Makro Ekonomi Provinsi NTT

Pada bagian ini akan membahas tentang dampak pandemi covid-19 secara makro ekonomi yang terjadi di Provinsi NTT. Beberapa indikator makro ekonomi yang akan di analisis pada bagian ini antara lain adalah pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2020.

a) Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II dan III Tahun 2020

Secara makro ekonomi, pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak pada perlambatan kinerja perekonomian Provinsi NTT tahun 2020. Hal ini sejalan dengan perlambatan kinerja perekonomian pada hampir seluruh provinsi-provinsi di Indonesia lainnya sebagai imbas dari pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan-II 2020 jika dibandingkan dengan triwulan I-2020 (*q-to-q*), maka ekonomi NTT pada triwulan-II 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,92%. Tetapi pertumbuhan ekonomi NTT Pada triwulan II-2020 apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 atau secara *y-on-y* mengalami kontraksi sebesar 1,96%.

Secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II 2020 juga mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Walaupun mengalami kontraksi pada triwulan yang sama tetapi kontraksi ekonomi NTT pada triwulan-II 2020 ini berada sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan kontraksi secara nasional. Menurut sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan-II 2020 di capai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 15,36% lalu diikuti oleh lapangan usaha jasa keuangan (12,32%) dan pengadaan listrik dan gas (11,76%) yang juga mengalami pertumbuhan positif. Selain itu terdapat beberapa lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif pada triwulan-II 2020 ini yaitu administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan pengadaan air sedangkan sisa lapangan usaha yang lainnya masih terkontraksi. Dari 17 sektor lapangan usaha hanya 6 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan-II 2020. Untuk lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam adalah lapangan usaha jasa perusahaan yang terkontraksi sebesar 52,5% lalu diikuti oleh lapangan usaha akomodasi makan minum sebesar -42,36% dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -23,22%. Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam ekonomi NTT yaitu mencapai 30% dari PDRB NTT juga mengalami penurunan.

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi

pada triwulan-II 2020 ini disebabkan karena pemberlakuan kebijakan *work from home* (WFH) baik pada instansi pemerintah maupun pada beberapa instansi swasta, pembatasan aktivitas-aktivitas ekonomi serta adanya pemberlakuan kebijakan pembelajaran secara online bagi para anak-anak di NTT sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di NTT sehingga hal ini berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan paket data internet baik untuk kegiatan WFH maupun untuk kegiatan pembelajaran bagi anak-anak sekolah. Selain itu juga lapangan usaha pengadaan listrik dan gas juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebagai dampak dari bekerja dan bersekolah yang dilakukan dari rumah dan masyarakat memiliki lebih banyak waktu dirumah yang berakibat pada meningkatnya pemakaian daya listrik PLN baik untuk bekerja, bersekolah, menonton tv, penggunaan *air conditioner* (AC) atau kipas angin, dan penggunaan alat-alat elektronik lainnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan dengan kontraksi terendah adalah konsumsi rumah tangga yaitu sebesar -4,40%, lalu diikuti oleh komponen konsumsi pemerintah sebesar -7,49% dan komponen PMTB sebesar -8,57%. Sedangkan untuk komponen Konsumsi LNPRT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni terkontraksi sebesar 0,5% dikarenakan adanya persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 9 kabupaten/kota di NTT pada tahun 2020. Menurunnya konsumsi rumah tangga pada triwulan-II 2020 disebabkan karena pemberlakuan kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 seperti adanya pembatasan aktivitas-aktivitas ekonomi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat dan berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga. Selain itu melemahnya konsumsi rumah tangga juga di sebabkan karena ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir sehingga masyarakat lebih memilih untuk menahan konsumsi sehingga dengan pendapatan yang ada lebih banyak untuk di tabung. Selain itu konsumsi pemerintah yang juga melambat karena realisasi anggaran pemerintah daerah yang sedikit tertunda karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 beserta dampak yang di timbulkan terutama terkait realisasi bantuan sosial (bansos) yang masih tertunda karena terkendala data penerima yang masih belum valid. Selain itu juga disebabkan karena realisasi dana transfer pusat ke daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan kinerja perekonomian di NTT pada triwulan-II 2020 ini disebabkan karena adanya pemberlakuan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkait pembatasan-pembatasan aktivitas seperti sekolah, aktivitas-aktivitas ekonomi seperti kegiatan perkantoran, pasar, dan perdagangan serta pembatasan kegiatan kemasyarakatan seperti ibadah, pesta, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Provinsi NTT. Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 1,68% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 (*y-on-y*). Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), maka ekonomi NTT pada triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,06%. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-III 2020 ini juga masih terkontraksi sebesar 3,49%. Jika dibandingkan dengan nasional maka ekonomi NTT pada triwulan-III 2020 masih berada sedikit lebih rendah dari nasional secara *y-on-y*. Walaupun masih terkontraksi tetapi pertumbuhan ekonomi baik Indonesia maupun

NTT pada triwulan-III 2020 sudah perlahan-lahan mengarah pada perbaikan-perbaikan seiring dengan diberlakukannya kebijakan *new normal* sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi maupun kemasyarakatan sudah dapat dijalankan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut lapangan usaha, pada triwulan-III 2020 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu tumbuh sebesar 17,18% lalu diikuti oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 14,03% dan kemudian lapangan usaha jasa keuangan 7,16%. Dari sisi lapangan usaha terdapat 8 sektor dari 17 sektor lapangan usaha yang tumbuh positif yaitu pertanian, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Sedangkan pada triwulan-III 2020 ini masih terdapat lapangan usaha yang berkontraksi cukup dalam yaitu jasa perusahaan yang berkontraksi sebesar 53,35% tetapi terdapat beberapa lapangan usaha yang berkontraksi secara *y-on-y* tetapi secara *q-to-q* sudah tumbuh walaupun masih negatif seperti lapangan usaha akomodasi makan minum pada triwulan-II sebesar -42,36, tetapi pada triwulan-III 2020 tumbuh -35,85. Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelonggaran aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan seperti adanya pesta-pesta, kegiatan di hotel-hotel, dan dibolehkannya kembali makan di tempat untuk usaha restoran.

Dari sisi pengeluaran, pada triwulan-III 2020 hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi kecuali komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang juga merupakan komponen pengeluaran yang menciptakan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,68%. Hal ini dikarenakan adanya persiapan pilkada di 9 kabupaten/kota di NTT. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan kontraksi terendah yaitu sebesar 2,38%. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontraksi sebesar 12,15%, dan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang juga kembali berkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 19,33% dari sebelumnya yang berkontraksi -7,49%. Hal tersebut dikarenakan masih tertundanya realisasi anggaran pemerintah daerah karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

a) **Inflasi**

Inflasi di Provinsi NTT pada triwulan-II 2020 relatif cukup stabil dan terkendali yaitu sebesar 1,57% dan lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,65%. Inflasi secara nasional pada triwulan-II 2020 berada di angka 1,96% dan relatif terkendali karena masih berada di bawah 2%. Inflasi NTT pada triwulan-II 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi secara nasional sehingga secara umum, pergerakan inflasi pada triwulan II tahun 2020 bergerak melandai cukup rendah dimana kondisi ini sejalan dengan pergerakan inflasi nasional yang juga mengalami tren penurunan dari triwulan sebelumnya. Penyebab Inflasi di Provinsi NTT pada triwulan II 2020 adalah naiknya harga pada kelompok makan minum (komoditas ikan kembung dan sawi hijau), tembakau (rokok kretek), dan emas. Kenaikan harga pada kelompok makan minum dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu seperti angin kencang, gelombang laut yang tidak menentu serta curah hujan yang rendah sehingga berdampak pada ketersediaan dan stabilitas pasokan. Sedangkan untuk komoditas tembakau sebagai bahan baku rokok kretek mengalami kenaikan karena adanya penyesuaian tarif bea cukai rokok. Inflasi yang terjadi di NTT juga dipengaruhi

karena adanya kebijakan penanganan covid-19 seperti adanya pembatasan aktivitas ekonomi, pembatasan perjalanan, dan pembatasan sosial (*sosial distancing*). Hal ini terlihat dari publikasi BPS, dimana di NTT pada periode ini lebih didominasi oleh adanya kenaikan indeks harga pada kelompok kesehatan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta adanya penurunan pada kelompok transportasi, rekreasi, olahraga, dan budaya. Dampak dari kebijakan pembatasan perjalanan mengakibatkan menurunnya tekanan harga pada kelompok transportasi dimana terjadi penurunan tarif angkutan udara di NTT selama masa pandemi covid-19 ini. Selain itu menurunnya harga untuk beberapa komoditas makanan/sayuran menjadi faktor utama penahan laju inflasi triwulan II 2020 di Provinsi NTT.

Untuk triwulan III 2020, inflasi provinsi NTT tetap terkendali yaitu sebesar 1,10% lebih rendah di bandingkan triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan nasional maka inflasi NTT pada triwulan-III 2020 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang berada di angka 1,42%. Beberapa komoditas yang menjadi pendorong terjadinya inflasi adalah ikan kembung, ikan tongkol, emas perhiasan, rokok kretek filter, dan rokok putih. Tetapi di sisi lainnya terjadi penurunan tarif angkutan udara, harga cabai rawit dan cabai merah, serta ikan ekor kuning dan ikan teri menjadi penghambat laju inflasi di NTT. Tren penurunan inflasi di NTT selama masa pandemi ini tidak terlepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT maupun Kabupaten/Kota yang saling berkoordinasi dan bersinergi untuk tetap menjaga stabilitas inflasi di NTT melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif sehingga inflasi di NTT tetap terkendali selama masa pandemi covid-19 ini.

b) Ketenagakerjaan

Pandemi covid-19 ini juga berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT selama tahun 2020. Dampak yang paling nyata adalah dirumahkannya (bersifat sementara) para pekerja pada beberapa sektor yang terdampak pandemi covid-19 ini bahkan ada yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara permanen. Hal tersebut terlihat dari data Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang menyatakan bahwa di awal pandemi covid-19 ini terdapat 219 tenaga kerja di NTT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berasal dari 18 perusahaan yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi NTT yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, Kupang dan Kota Kupang. Dari tujuh kabupaten/kota tersebut, jumlah tenaga kerja yang di PHK paling banyak berasal dari Manggarai Barat yakni 82 tenaga kerja, Timor Tengah Selatan 56 tenaga kerja dan Kota Kupang sebanyak 37 tenaga kerja. Menurut data Diskopnakertrans Provinsi NTT sampai dengan Mei 2020 tercatat 6.529 tenaga kerja di wilayah NTT yang dilaporkan terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlah ini berasal dari 275 perusahaan yang tersebar di 20 kabupaten/kota di NTT yang terdiri dari 219 orang di PHK, 4.852 orang yang dirumahkan serta 1.458 orang dikurangi jam kerjanya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk sementara Kabupaten Manggarai Barat sebagai kabupaten yang jumlah tenaganya paling banyak mengalami PHK di awal masa pandemi covid-19 ini. Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang mengandalkan sektor pariwisata dalam perekonomiannya dan menurut data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa salah satu sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi

ini adalah sektor pariwisata sebagai dampak dari adanya larangan perjalanan baik untuk turis asing maupun domestik. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan dari para pengusaha di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat seperti hotel-hotel, rumah makan/restoran, dll. Dengan demikian karena tidak adanya turis/wisatawan yang datang yang berdampak pada tidak adanya pendapatan maka salah satu cara untuk sektor pariwisata dapat bertahan di masa pandemi ini adalah dengan merumahkan para pekerjanya atau pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban biaya perusahaan.

Sejalan dengan dirumahkannya para pekerja pada sektor-sektor yang terdampak pandemi covid-19 membuat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT meningkat cukup signifikan. Berdasarkan data BPS angka TPT Provinsi NTT pada Agustus 2020 meningkat 1,14% menjadi 4,28% (0,12 juta orang) atau meningkat sebesar 0,04 juta orang di bandingkan dengan Agustus 2019. Dari angka tersebut terdapat terdapat 373,22 ribu orang yang terdampak akibat pandemi covid-19 dengan rincian pengangguran karena Covid-19 sebanyak 13,76 ribu orang, BAK karena Covid-19 sebanyak 4,98 ribu orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 16,50 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 337,98 orang (BPS Provinsi NTT, 2020).

Secara nasional, angka TPT Indonesia juga cenderung meningkat dimana pada tahun 2018 berada di angka 5,35% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 7,07%. Jika dibandingkan dengan nasional maka angka TPT di NTT untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 masih berada di bawah angka TPT nasional. Peningkatan angka TPT di tahun 2020 ini disebabkan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dimana hampir seluruh Provinsi di Indonesia juga terdampak akibat pandemi ini termasuk NTT sehingga beberapa sektor lapangan usaha yang terdampak harus merumahkan para tenaga kerjanya sehingga berdampak pada meningkatnya angka TPT baik di level nasional maupun di Provinsi NTT. Peningkatan angka pengangguran ini berpotensi untuk menimbulkan masalah lainnya, salah satunya adalah meningkatnya angka kemiskinan. Ratio perbandingan secara persentase adalah untuk pekerja formal hanya berkisar antara 23-27% sedangkan untuk pekerja informal mencapai lebih dari 72%. Pada Agustus 2020 persentase pekerja informal meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya sebesar 72,26% meningkat menjadi 76,10%. Hal sebaliknya terjadi pada pekerja formal dimana pada Agustus 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 27,74% pada tahun 2019 menjadi 23,90% di tahun 2020. Menurunnya jumlah pekerja formal sebagai imbas dari pandemi covid-19 sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya para karyawan/pegawai/buruh pada beberapa sektor lapangan usaha di NTT. Dengan banyaknya tenaga kerja pada sektor informal mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja di NTT tidak memiliki penghasilan yang tidak pasti sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti yang terjadi saat ini akibat pandemi covid-19.

c) Angka Kemiskinan

Pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS pada September 2020 angka kemiskinan Indonesia kembali meningkat menjadi 2 digit yaitu dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% dan jumlah penduduk miskin pun juga meningkat dari 24,79 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, angka kemiskinan di wilayah perdesaan meningkat dari 12,6% pada september 2019 menjadi 13,2% pada september 2020 dan untuk wilayah perkotaan juga mengalami peningkatan dari 6,56% pada september 2019 menjadi

7,88% pada september 2020. Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2020 menyebutkan bahwa meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia sebagai dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 mengakibatkan terhentinya aktivitas-aktivitas ekonomi di masyarakat. Hal tersebut tentu saja akan mendorong meningkatnya angka pengangguran, menurunnya produktivitas individu maupun perusahaan serta memicu munculnya orang miskin baru (Izzati 2020; Suryahadi et al. 2020). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tarigan *et al*, (2020) yang menyatakan bahwa dampak dari kebijakan PSBB dan anjuran untuk tetap di rumah mengakibatkan perekonomian nasional menjadi lumpuh sehingga terjadi pengurangan karyawan (angka pengangguran meningkat) dan pertumbuhan ekonomi melambat serta meningkatnya angka kemiskinan.

Hampir diseluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah yang menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kemiskinan di wilayahnya selama masa pandemi covid-19 ini. Menurut data BPS (2020) bahwa terdapat beberapa Provinsi yang diprediksikan akan mengalami dampak dari pandemi dan juga peningkatan jumlah penduduk miskin seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan NTT.

Di Nusa Tenggara Timur menurut data BPS selama masa pandemi covid-19 ini juga mengalami peningkatan angka kemiskinan. Pada Maret 2020 angka kemiskinan di NTT tercatat sebesar 20,90% meningkat sebesar 0,28% dari September 2019 yang berada di angka 20,62%. Dan pada September 2020 angka kemiskinan di NTT tercatat meningkat sebesar 21,21% atau meningkat 0,31% terhadap Maret 2020. Dan dari sisi jumlah penduduk miskin pun mengalami peningkatan sebesar 19,77 ribu terhadap Maret 2020 dan meningkat sebesar 44,07 ribu terhadap September 2019.

Peningkatan angka kemiskinan di NTT sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan secara nasional. Persentase angka kemiskinan di NTT pada September 2020 berada lebih tinggi di bandingkan dengan nasional yang berada di angka 10,19%. Menurut data BPS (2020), Provinsi NTT menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,70%). Selama beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan di NTT menunjukkan tren penurunan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 ini yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi di masyarakat yang berujung pada hilangnya pendapatan masyarakat terutama pada sektor informal yang sangat rentan karena pendapatan yang tidak menentu yang berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan di NTT.

Meningkatnya angka kemiskinan di NTT sebagai dampak dari pandemi covid-19 ini perlu direspon oleh pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan. Pemerintah pusat telah merespon keadaan ini dengan mengeluarkan berbagai program kebijakan seperti program jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan sosial (bansos) tunai maupun bantuan berupa sembako, subsidi gaji karyawan serta bantuan listrik gratis. Selain itu juga terdapat beberapa program yang dikeluarkan pemerintah seperti BLT dana desa, kartu prakerja, dan

bantuan untuk pelaku UMKM (Yumna et al. 2020). Berbagai program dan kebijakan pemerintah tersebut diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19 dan menjaga kelompok yang rentan untuk tidak memunculkan orang miskin yang baru. Sedangkan bantuan/insentif bagi para pelaku usaha bertujuan agar usahanya tetap dapat berjalan selama masa pandemi ini sehingga roda perekonomian dapat tetap berjalan.

Pemerintah Provinsi NTT juga merespon keadaan ini dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 286 Milyar yang diperoleh dari hasil realokasi dan refocusing APBD I yang mencakup pencegahan dan penanganan kesehatan sebesar Rp. 81 miliar, Rp. 105 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Rp100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dikhususkan bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin di luar penerima PKH dan 300 ribu KK yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Skema penyaluran JPS yang diberikan adalah setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp.500 ribu/bulan yang terdiri dari Rp.150 ribu uang tunai dan Rp.350 ribu dalam bentuk sembako dan akan diberikan selama 3 bulan. Sedangkan terkait dana pemberdayaan ekonomi, akan dilakukan dengan cara pengalihan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang berbentuk proyek dengan pendekatan padat karya. Dimana masyarakat akan dilibatkan dalam pengerjaan jalan, jembatan, irigasi dan pengerjaan infrastruktur lainnya. Hasil kajian Dampak Stimulus Pemerintah terhadap Ekonomi menyebutkan bahwa anggaran perlindungan sosial mampu memberikan manfaat dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hasil perhitungan Asia Development Bank (ADB), menyebutkan bahwa lewat bantuan sosial mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 16,9%. Hal yang sama juga terjadi di Mongolia dimana bantuan sosial mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 34,7% (Himbara, 2021).

Dengan demikian salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di masa pandemi ini adalah melalui bantuan sosial tetapi bantuan sosial yang diberikan harus tepat sasaran karena biasanya dalam penyaluran bantuan sosial selalu terkendala pada permasalahan data yang kurang valid dan akurat sehingga sering salah sasaran dan tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

2) Dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di NTT

Dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga di NTT diukur dengan menggunakan beberapa indikator seperti pendapatan, pengeluaran, pengangguran, peningkatan harga barang, alternatif sumber penghasilan lain, daya beli masyarakat, dan kesempatan kerja.

a) Pendapatan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 60% responden menjawab bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan dan 37% responden menjawab pendapatan mereka tetap selama pandemi covid-19 ini. Sedangkan ada 3% responden menjawab bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan selama masa pandemi covid-19 ini. Mayoritas Responden yang menjawab bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan adalah para karyawan swasta dan para wiraswasta pada beberapa sektor seperti sektor transportasi dan Pergudangan (rental mobil, ojek online), penyediaan akomodasi makan minum (hotel, rumah makan, usaha catering), Konstruksi (kuli proyek), *event organizer* (EO), dan perdagangan (toko baju, alat elektronik, bahan bangunan). Penurunan pendapatan untuk para wiraswasta dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan

seperti larangan untuk makan di tempat bagi rumah makan/restoran, adanya larangan perjalanan dan penutupan penerbangan yang berdampak pada hotel-hotel, serta adanya larangan untuk tidak boleh mengadakan pesta/perayaan. Sedangkan bagi para karyawan swasta/pekerja swasta penurunan pendapatan tersebut dikarenakan adanya pemotongan gaji. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut kehilangan pendapatan sehingga berimbas pada dirumahnya para pekerja pada sektor tersebut, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengurangan jam kerja yang tentu saja akan berdampak pada hilangnya pendapatan atau berkurangnya pendapatan para pekerja. Hal ini sejalan dengan hasil survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menunjukkan bahwa dampak pandemi membuat kelangsungan ekonomi rumah tangga masyarakat di Indonesia semakin terpuruk karena konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang perekonomian Indonesia mengalami perlambatan yang signifikan. Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha (Agus Eko Nugroho, 2020). Hasil ini juga sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Fornaro dan Wolf (2020) yang menyatakan bahwa menurun/hilangnya pendapatan tersebut sebagai dampak dari dirumahnya para karyawan (terjadi PHK) sebagai akibat dari menurunnya permintaan barang dan jasa yang mengakibatkan perusahaan harus merumahkan karyawannya yang berpotensi meningkatnya angka pengangguran sehingga kesempatan kerja akan semakin berkurang.

Sedangkan ada sebagian kecil ASN yang menjawab bahwa mereka juga mengalami penurunan pendapatan karena tidak ada lagi perjalanan dinas dan honor-honor karena semua anggaran di realokasi dan *refocusing* untuk penanganan covid-19. Sedangkan untuk responden yang menjawab bahwa pendapatan mereka tetap adalah sebagian besar para ASN, karyawan swasta (pegawai bank, karyawan LSM, guru PNS dan guru non PNS) pada sektor jasa keuangan dan asuransi, dan jasa pendidikan. Responden yang menjawab bahwa pendapatan mereka tetap selama pandemi covid-19 ini adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sehingga dengan adanya pandemi ini tidak berpengaruh pada pendapatan mereka setiap bulannya.

Selain itu terdapat juga sebagian kecil responden (3%) yang menjawab bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan yaitu yang bekerja sebagai wiraswasta pada sektor informasi dan komunikasi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Beberapa sektor usaha tersebut mengalami peningkatan pendapatan seperti sektor informasi dan komunikasi karena selama masa pembatasan aktivitas sosial kebutuhan akan internet sangat krusial terutama untuk aktivitas yang dilakukan secara daring baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, sosial, keagamaan, hiburan, hingga transaksi ekonomi. Sedangkan pada sektor pertanian dikarenakan disaat pandemi ini masyarakat memiliki lebih banyak waktu dirumah sehingga mereka memilih untuk menanam sayur-sayuran pada lahan yang dimiliki yang juga sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pendapatan, golongan pendapatan < 1 juta yang paling banyak menjawab bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan. Responden dengan tingkat pendapatan < 1 juta adalah para pekerja informal (pekerja harian atau buruh) yang sangat bergantung dari upah harian sehingga dengan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat akan berdampak pada pengurangan jam kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

b) Pengeluaran

Hasil survei menunjukkan bahwa 68% responden menjawab mereka mengalami peningkatan pengeluaran, 20% menjawab pengeluarannya tetap, dan 12% yang menjawab mengalami penurunan pengeluaran. Untuk responden yang menjawab bahwa mereka mengalami peningkatan pengeluaran sebagian besar adalah responden yang berstatus sudah menikah. Adanya himbauan pemerintah untuk menjaga jarak (*social distancing*), kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, dan kebijakan untuk bekerja di rumah (*Work From Home*) dan bersekolah dari rumah membuat masyarakat melakukan segala aktivitasnya di rumah mulai dari kegiatan bekerja, sekolah, beribadah, bahkan berbelanja sekalipun dapat dilakukan dari rumah. Dengan adanya himbauan/kebijakan tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengaku mengalami peningkatan pengeluaran selama mereka beraktivitas dari rumah. Hasil ini sejalan dengan temuan dari kajian dampak covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat provinsi Jambi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jambi dimana dari hasil kajian tersebut diperoleh 53,13% responden menyatakan pengeluaran mereka bertambah sejak Covid-19 terjadi, yang menyatakan pengeluaran mereka tetap sebesar 32,36% dan yang menyatakan turun sebesar 14,51%. Hasil yang sama juga ditemukan dari hasil survei Badan Pusat Statistik (2020) sebesar 56% responden mengalami peningkatan pengeluaran di masa pandemi, 17% mengalami penurunan, dan sisanya tetap selama pandemi ini. Sehingga dari hasil survei tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama masa pandemi covid-19 ini masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran tetapi disisi lainnya masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan.

c) Peningkatan Pengeluaran Rumah Tangga

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas atau 68% responden menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan pengeluaran. Menurut hasil survei peningkatan pengeluaran dalam rumah tangga yang terbesar adalah untuk belanja bahan makanan yaitu mencapai 68,5% dan yang terbesar ke dua adalah untuk belanja pulsa/paket data yaitu mencapai 63,7%. Selain itu untuk biaya listrik juga cukup tinggi yaitu mencapai 42,1% dan untuk obat-obatan sebesar 35,4% dan untuk makanan minuman jadi sebesar 37,7%. Sedangkan untuk pengeluaran lainnya seperti Biaya peralatan kesehatan, Air (PDAM dan Tangki), Vitamin, *Hand sanitizer*, disinfektan, dan Masker mencapai 11,3%. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Kajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2020 dimana 61,27% responden menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi bahan makanan berupa sembako; beras; dan lauk mentah. Kemudian diikuti oleh peningkatan konsumsi kesehatan seperti obat dan vitamin sebesar 64,72% dan yang berikut adalah pengeluaran untuk pulsa dengan persentase responden yang menyatakan meningkat adalah sebesar 59,39%. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Baker *et al* (2020) yang juga menemukan bahwa kecenderungan peningkatan pengeluaran rumah tangga adalah untuk makanan. Dari ke tiga hasil temuan tersebut sama-sama menemukan bahwa peningkatan pengeluaran rumah tangga yang paling dominan selama pandemi covid-19 ini adalah untuk membeli bahan makanan. Kemudian diikuti oleh pengeluaran untuk kesehatan seperti membeli obat-obatan dan vitamin lalu pengeluaran untuk pulsa data/internet.

Pandemi covid-19 membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan lebih banyak berdiam diri di rumah. Hal tersebut telah memberikan perubahan dalam pengeluaran belanja rumah tangga. Selama pandemi ini masyarakat cenderung untuk lebih memilih untuk

memasak sendiri makanan di rumah dan mengurangi kegiatan makan di restoran/rumah makan sehingga pengeluaran rumah tangga untuk belanja bahan makanan menjadi meningkat. Selanjut, dengan adanya kebijakan *work from home* (WFH) dan sekolah dari rumah yang mengharuskan menggunakan fasilitas internet dan pulsa/paket data menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk pulsa data/paket data menjadi meningkat. Sedangkan peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk biaya listrik yang meningkat selama masa pandemi ini disebabkan karena penggunaan alat-alat elektronik seperti AC/kipas angin selama berada di rumah, menonton tv, lalu untuk kegiatan bekerja dan sekolah yang menggunakan laptop/HP yang membutuhkan listrik untuk mengisi daya baterainya. Dan yang terakhir adalah peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan yaitu untuk membeli obat-obatan dan vitamin dimana selama masa pandemi ini masyarakat di tuntut untuk memiliki kondisi tubuh yang tetap prima sehingga tidak mudah terserang virus/penyakit dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu alat-alat kesehatan lainnya yang wajib dimiliki di masa pandemi ini adalah masker dan handsanitizer. Ke dua barang ini wajib di bawa ketika keluar rumah di masa pandemi covid-19. Hal ini tentu saja akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk bidang kesehatan di bandingkan sebelum adanya pandemi.

d) Alternatif Sumber Penghasilan Lain

Hasil survei menunjukkan bahwa 81% responden menjawab bahwa tidak ada alternatif sumber penghasilan lain selama masa pandemi ini sedangkan hanya 19% responden menjawab ada alternatif sumber penghasilan lain yang dikerjakan selama masa pandemi ini. Untuk responden yang menjawab bahwa tidak ada alternatif sumber penghasilan lain mayoritas berstatus masih bekerja sebagai ASN dan karyawan swasta (jasa keuangan dan jasa pendidikan) yang notabene memiliki pendapatan tetap setiap bulannya dan tidak terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19 dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Alasan kelompok responden ini tidak memiliki alternatif penghasilan lainnya adalah (1) karena ketika pandemi kelompok responden tersebut tetap harus bekerja dan juga waktu kerja yang tidak memungkinkan untuk adanya usaha tambahan, dan (2) dengan pendapatan yang ada sudah di rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama masa pandemi ini. Sedangkan, untuk responden yang menjawab bahwa ada alternatif sumber penghasilan lain sebagian besar berstatus masih bekerja (ASN dan karyawan kontrak). Untuk kelompok responden ini mencari mereka memiliki sumber penghasilan lain untuk menambah pendapatan rumah tangga mereka selama masa pandemi. Alasan mereka menambah sumber penghasilan lain adalah (1) ada peluang usaha baru yang muncul selama pandemi covid-19 ini, (2) peningkatan pengeluaran rumah tangga sehingga mereka harus mencari tambahan sumber penghasilan lainnya. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhirah (2021) dimana beberapa pedagang kaki lima memilih untuk menambah penghasilan keluarga mereka dengan melakukan usaha lainnya karena pendapatan yang menurun drastis selama masa pandemi dikarenakan pembeli yang sepi terutama yang memiliki pelanggan tetap dari anak sekolah.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa alternatif sumber penghasilan tambahan selama masa pandemi ini dibutuhkan untuk tetap mempertahankan ekonomi rumah tangganya ketika pendapatan mereka mengalami penurunan baik dari usaha ataupun sebagai pekerja terutama untuk sektor-sektor usaha yang terdampak akibat pandemi ini. Selain itu alternatif tambahan penghasilan juga dilakukan karena adanya peluang usaha baru yang muncul karena adanya

pandemi ini seperti masker, jamu herbal, dll. Hal lain yang juga mempengaruhi dibutuhkan sumber penghasilan tambahan adalah karena meningkatnya pengeluaran rumah tangga selama masa pandemi ini terutama untuk kebutuhan pulsa data untuk internet maupun listrik sebagai dampak dari kebijakan WFH dan sekolah dari rumah.

e) Bidang alternatif sumber penghasilan lain

Bagi responden yang menjawab bahwa ada alternatif sumber penghasilan lain selama masa pandemi ini, dari jawaban responden diketahui bahwa bidang pekerjaan yang paling banyak dilakukan sebagai alternatif sumber penghasilan lain selama masa pandemi ini adalah bidang pekerjaan lainnya (40,6%) yang meliputi berbisnis online/penjualan online, memberi les privat, ojek online, dan beternak. Bidang pekerjaan lainnya yang cukup banyak dilakukan adalah penjualan bahan makanan yaitu mencapai 27,5%, selain itu juga penjualan masker sebesar 22,5%, penjualan makanan dan minuman jadi sebesar 22,5%, dan penjualan obat-obatan dan vitamin sebesar 9,4%.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa selama masa pandemi ini masyarakat memilih alternatif berjualan secara online untuk menambah penghasilannya. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat dan juga himbuan untuk menjaga jarak dan mengurangi interaksi/kontak fisik sehingga salah satu jalan adalah melalui berjualan secara online. Selain itu usaha/bisnis yang mampu eksis dimasa pandemi ini adalah usaha/bisnis online atau usaha yang dapat memanfaatkan teknologi (*e-commerce*) karena kedepan semua bisnis sudah harus diarahkan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri 4.0 sehingga momentum pandemi covid-19 ini menjadi momentum untuk dapat melatih dan mempersiapkan masyarakat dan UMKM untuk dapat menghadapi revolusi industri 4.0. Bisnis online merupakan solusi aman dari penyebaran covid-19 bila dibandingkan dengan bisnis konvensional atau tatap muka secara langsung. bisnis *online* menjadi pilihan karena bisa menjangkau lebih banyak pembeli dan tidak terbatas dan bisa dilakukan dari rumah atau dari mana saja.

Himbauan untuk tetap di rumah saja membuat banyak masyarakat yang beralih ke belanja online yang dinilai lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu adanya adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi, telah menggeser pola belanja dari offline menjadi online. Ini terlihat dengan meningkatnya transaksi online selama masa pandemi Covid-19 ini dimana jumlah transaksi online shop meningkat 400 persen dan diprediksi akan terus berlanjut pada new normal (Ramli, 2020). Hal yang sama juga terjadi di NTT dimana berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan NTT menunjukkan bahwa akselerasi transaksi *e-commerce* di Provinsi NTT terus meningkat di tengah pandemi COVID-19. Nilai transaksi melalui *e-commerce* di Provinsi NTT meningkat pada triwulan III 2020 dengan nominal transaksi *e-commerce* tercatat sebesar Rp239,98 miliar, tumbuh 87,41% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 43,48% (yoy) (Laporan Perekonomian NTT, 2020).

f) Dampak Terhadap Daya Beli

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa 73% responden menjawab bahwa terjadi penurunan daya beli, tetapi terdapat 14% responden yang menjawab tidak terjadi perubahan daya beli, sedangkan 13% responden menjawab terjadi peningkatan daya beli. Untuk responden yang menjawab terjadi penurunan daya beli sebagian besar berstatus sementara dirumahkan/PHK. Sedangkan untuk responden yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan daya beli mayoritas berstatus masih bekerja dan untuk responden yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan daya beli sebagian besar juga berstatus masih bekerja. Jika di kaitkan

dengan pendapatan lebih dari 90% responden yang menjawab terjadi penurunan daya beli juga mengalami penurunan pendapatan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniati dan Amini (2020) yang menunjukkan bahwa pandemi covid-19 di Provinsi NTB berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang dapat dilihat dari hasil deskripsi data Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kecenderungan menurun.

Hal yang sama juga terjadi di NTT dimana penurunan daya beli masyarakat pada triwulan II-2020 yang terkonfirmasi lewat survei indeks keyakinan konsumen (IKK) dimana kondisi keuangan rumah tangga pada triwulan II-2020 yang cenderung menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2020 tersebut semua komponen survei konsumen mencatat indeks keyakinan di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan konsumsi rumah tangga serta ekspektasi masyarakat yang pesimis akibat wabah covid-19 sehingga masyarakat lebih memilih untuk menahan konsumsi. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,40% (Laporan Perekonomian NTT, 2020).

Penurunan pendapatan pada level rumah tangga disebabkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga adalah melalui Jaring Pengaman Sosial atau *Social safety net* yang diberikan untuk melindungi daya beli masyarakat sebagai imbas dari penurunan pendapatan masyarakat karena adanya pandemi covid-19 ini. Secara konseptual menurun/hilangnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan pada belanja rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh dua hal yaitu (1) Meningkatnya jumlah pengangguran yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan belanja konsumsi rumah tangga dan (2) peningkatan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan dialihkannya konsumsi pada tabungan oleh rumah tangga yang pendapatannya belum terlalu terdampak dari krisis akibat pandemi ini (Modjo, 2020). Menurut Fornaro dan Wolf (2020) dengan adanya pandemi ini menyebabkan menurunnya permintaan karena menurunnya daya beli masyarakat akibat menurunnya/hilangnya pendapatan masyarakat.

Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan berbagai stimulus untuk tetap menjaga daya beli masyarakat seperti melalui program perlindungan sosial yang bersifat cash transfer lewat program PKH, Bansos Tunai, Sembako, BLT dana desa, Kartu Prakerja, Subsidi gaji, dan bansos untuk UMKM. Sementara Pemerintah Provinsi NTT juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 105 Milyar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan skema penyalurannya adalah uang tunai Rp150.000 dan beras senilai Rp350.000 untuk warga terdampak pandemi covid-19 (Laporan Perekonomian Provinsi NTT, 2020).

Dengan adanya berbagai stimulus baik dari pemerintah pusat maupun daerah tersebut kondisi keuangan sektor rumah tangga di triwulan III 2020 di NTT menunjukkan indikasi pemulihan /perbaikan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan kinerja pada konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi sebesar 2,38% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 4,40% (yoy). Fakta lain yang mengindikasikan pemulihan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh KPw

BI NTT yang menunjukkan perbaikan tingkat keyakinan konsumen dimana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2020 sebesar 65,67 membaik menjadi 84,95 pada triwulan III 2020. Peningkatan IKK pada triwulan III 2020 ditopang oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen yang tercatat sebesar 105,78 (zona optimis), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar 76,44 (Laporan Perekonomian NTT, 2020).

g) Persepsi Masyarakat Terkait Tingkat Kepentingan (Ekonomi dan Kesehatan)

Hasil survei menunjukan bahwa 65% responden menjawab sama-sama penting antara kesehatan dan ekonomi tetapi terdapat 32% responden menjawab bahwa kesehatan lebih penting. Sedangkan hanya 3% responden menjawab lebih penting ekonomi. Untuk responden yang menjawab bahwa kesehatan lebih penting adalah ASN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap sehingga dengan adanya pandemi ini tidak berdampak pada pendapatan mereka. Tetapi berbeda dengan responden yang menjawab ekonomi lebih penting adalah responden pekerja pada sektor informal dengan status pekerjaan adanya masih sementara bekerja, ada yang sementara sedang mencari pekerjaan dan ada yang sementara dirumahkan/ terkena PHK. Untuk kelompok responden ini merupakan pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada pendapatan harian sehingga mereka harus tetap bekerja walaupun di masa pandemi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sedangkan untuk responden yang menjawab sama-sama penting sebagian besar adalah responden yang bekerja sebagai ASN dan karyawan swasta yang juga memiliki pendapatan tetap setiap bulannya tetapi di satu sisi mereka juga tetap harus bekerja untuk memperoleh pendapatan tetapi disisi lainnya mereka juga tetap mementingkan masalah kesehatan dan untuk kelompok ini cenderung sudah memiliki pemahaman yang baik terkait covid-19 dan protokol kesehatan. Hasil ini agak sedikit berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Mei 2020, dimana sebagian besar responden lebih mementingkan kesehatan yaitu sebanyak 60,7%, sementara hanya 33,9% yang memilih mengutamakan ekonomi dan yang tidak menjawab 5,4%.

Hasil ini juga agak berbeda dengan hasil riset lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) pada September 2020 yang menemukan bahwa sebesar 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi Covid-19 ini. Survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan Juni 2020 mendapati bahwa 63,4% masyarakat juga lebih memilih kesehatan daripada ekonomi. Jadi ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 11 persen dalam rentang waktu Juni hingga September 2020 ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak pandemi covid-19 telah berdampak pada perlambatan kinerja perekonomian di Provinsi NTT baik dari sisi makro maupun mikro pada level rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II dan III tahun 2020 yang masih terkontraksi karena sebagian besar lapangan usaha masih tumbuh negatif dan juga dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih terkontraksi pada triwulan II dan III tahun 2020. Selain itu dampak pandemi covid-19 ini juga mengakibatkan meningkatnya angka tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan yang juga diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan di Provinsi NTT. Selain itu dengan adanya pandemi covid-19 ini mengakibatkan banyak rumah tangga di NTT mengalami penurunan pendapatan yang berujung pada penurunan daya beli. Dengan

diberlakukannya berbagai pembatasan beraktivitas diluar rumah juga mengakibatkan terjadinya peningkatan pengeluaran dalam rumah tangga terutama untuk pembelian bahan makanan, pulsa/paket data, dan biaya listrik. Untuk mengimbangi pendapatan yang menurun dan meningkatnya pengeluaran maka ada sebagian kecil responden yang mencari alternatif sumber penghasilan lain dan paling banyak adalah melakukan aktivitas berjualan online, menjual bahan makanan, menjual makanan dan minuman jadi, menjual obat-obatan dan vitamin serta masker. Berdasarkan hasil kajian ini dapat disarankan beberapa hal antara lain Mempercepat penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta percepatan realisasi belanja barang dan jasa pemerintah di kuartal IV tahun 2020. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai sektor penunjang dalam masa pandemi ini melalui pemanfaatan potensi pertanian lokal sebagai salah satu bagian dalam Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, untuk itu perlu ada upaya penyiapan SDM tenaga kerja yang mampu menggunakan teknologi.

REFERENSI

- Agus Eko Nugroho. (2020, Agustus 23). Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia. Diakses dari <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Aliah, N. (2020) *“THE IMPACT OF COVID 19 ON NATIONAL ECONOMIC GROWTH” INTERNATIONAL PROCEEDING OF LAW & ECONOMIC IPLE 2020.*
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2020. Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan III-2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2020. Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2020.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baker, S. Farrokhnia. M, Steffen. P, Michaela. & Yannelis, C. 2020. HOW DOES HOUSEHOLD SPENDING RESPOND TO AN EPIDEMIC? CONSUMPTION DURING THE 2020 COVID-19 PANDEMIC. Working Paper 26949 <http://www.nber.org/papers/w26949>.
- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTT. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi NTT Tahun 2020.
- Himbara. (2021, Agustus). Bantuan Sosial Diprediksi Mampu Turunkan Kemiskinan hingga 16,9%. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/03/bantuan-sosial-diprediksi-mampu-turunkan-kemiskinan-hingga-169>.
- Hine, C. (2000). Virtual Ethnography. <https://bisnis.tempo.co/read/1333439/dampak-wabah-corona-8-ribu-pekerja-di-ntt-terkena-phk>
- <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world> June, 8 2020.
- Luca Fornaro and Martin Wolf, (2020), “Covid-19 Coronavirus and Macroeconomic Policy”, <https://www.crei.cat/wp-content/uploads/2020/03/C19.pdf>
- McKibbin, W., & Fernando, R. (2020). *The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios* (No. 2020-19). Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.

- Media Indonesia. (2020). Mengantisipasi Dampak Covid-19 ke Perekonomian Nasional. Retrieved April 18, 2020, from <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/296853-mengantisipasi-dampak-covid-19-ke-perekonomian-nasional>
- Modjo M. 2020. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi," *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Murthy, D. (2008). Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research. *Sociology*, 42(5), 837–855. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0038038508094565>
- Musniasih Yuniati, Rohmiati Amini. 2020. "ANALISIS DAMPAK COVID –19 TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT NTB" *Mpu Procuratio : Jurnal Penelitian Manajemen*, Volume 2, No 2, Desember 2020 Hal 362-368.
- Nadhirah, S.M. 2021. "KONDISI SOSIAL EKONOMI DI MASA PANDEMI PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN BANTAN KECAMATAN MEDAN TEMBUNG". SKRIPSI. PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
- Nanga M. 2001. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Octaviani R.A. 2016. ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MIX USE DI KECAMATAN JABON | *JKMP* (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234.
- Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Provinsi NTT 2020
- Putong. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ramli. (2020, May 22). Transaksi Penjualan Online Naik 400 Persen di Masa Pandemi Covid-19. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/19452-transaksi-penjualan-online-naik-400-persen-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Soediyono R. 2000. *Ekonomi Makro (Pengantar Analisis Pendapatan Nasional)*, Edisi Kelima. Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta
- Sudjana. 2001. *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung : Falah Production.
- Suryahadi A, Izzati RA, Suryadarma D. 2020. The impact of Covid-19 outbreak on poverty: an estimation for Indonesia. *Bull Indones Econ Stud*. 56(2):175-192. doi:10.1080/00074918.2020.1779390.
- Susilawati, Falefi, R, Purwoko, A. 2020. Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 3, No 2, May 2020, Page: 1147-1156*
- Tarigan H, Sinaga J, Rachmawati R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor*.
- Yumna A, Arfyanto H, Bima L, Bachtiar PL. 2020. Jaringan pengamanan sosial dalam krisis Covid-19: apa yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah. *SMERU Catatan Kebijakan No.3/Mar/2020*. Jakarta (ID): SMERU Research Institute.